

Analisis Kinerja Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) pada PPI Madiun dalam Mencapai Target Penerimaan Non-APBN

Sarah Edmonda¹, Alifah Cahaya Hati², Anna Marina³

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Corresponding Author Sarah Edmonda, E-Mail: sarah.edmonda-2022@fe.um-surabaya.ac.id

Published: June, 2025

ABSTRACT

This study aims to analyze the financial performance of the Public Service Agency (BLU) at the Indonesian Railway Polytechnic (PPI) Madiun in achieving non-APBN revenue targets through a quantitative descriptive approach. Using secondary financial report data from 2016 to 2020, this study evaluates PPI's financial performance by measuring eight financial ratios including cash ratio, current ratio, receivables collection period, fixed asset turnover, return on fixed assets, return on equity, inventory turnover, and the ratio of PNB to operating costs. The results of the analysis show that PPI's financial performance score during the period was in the "moderate" category, with fluctuations in scores reflecting challenges in achieving optimal efficiency and financial balance. Although there have been improvements in several indicators, asset management and financial surplus are still aspects that need to be improved to support sustainable services and more effective financial management.

Keywords: Financial Performance, Public Service Agency (BLU)

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) sebagaimana diamanahkan dalam pasal 69 ayat (7) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. PP tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik oleh Pemerintah, karena sebelumnya tidak ada pengaturan yang spesifik mengenai unit pemerintahan yang melakukan pelayanan kepada masyarakat yang pada saat itu bentuk modelnya beraneka macam. Jenis BLU di sini antara lain rumah sakit, lembaga pendidikan, pelayanan lisensi, penyiaran, dan lain-lain.

Badan Layanan Umum (BLU) merupakan instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.

Peraturan keuangan negara telah merubah mindset atau pola pikir yang lebih

efisien, profesionalitas, akuntabel, dan transparan, dengan melakukan perubahan dari penganggaran tradisional menjadi penganggaran berbasis kinerja, yang membuka koridor bagi penerapan basis kinerja di lingkungan pemerintah. Dengan basis kinerja ini, arah penggunaan dana pemerintah menjadi lebih jelas dari hanya membiayai input dan proses menjadi berorientasi pada output. Perubahan ini sangat berarti mengingat kebutuhan dana yang semakin tinggi, sedangkan sumber daya yang dimiliki pemerintah terbatas.

Tuntutan untuk meningkatkan tata kelola yang baik (*good government governance*) disektor pemerintah terus meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak kewarganegaraan. Penciptaan tata kelola yang baik tersebut menuntut perubahan dalam sistem manajemen keuangan pemerintah. Tuntutan tersebut juga tidak lepas dari pengaruh globalisasi yang sedang melanda dunia, yang menjadikan norma-norma tata kehidupan suatu negara sebagai bagian integral dari norma umum kehidupan dunia sehingga praktik-praktik dunia bisnis dan pemerintah suatu negara akan terpengaruh oleh norma-norma umum yang berada di negara lain.

Untuk menciptakan tata kelola yang baik pemerintah sebagai pihak eksekutif yang paling bertanggungjawab dalam pelaksanaan pemerintahan, perlu meningkatkan pelaksanaan unsur-unsur *good government governance* secara konsisten. Unsur-unsur tata kelola yang baik tersebut antara lain Transparansi, Akuntabilitas dan Demokrasi.

Perubahan paradigma dalam sistem pengelolaan keuangan pemerintah yang paling menonjol sebagai bagian dari paket reformasi dibidang keuangan negara adalah adanya pergeseran dari sistem penganggaran tradisional kesistem penganggaran berbasis kinerja, dimana pembiayaan tidak hanya membiayai masukan (*inputs*) atau proses, tetapi sudah diarahkan pada pembiayaan yang membiayai hasil (*outputs*).

Adanya BLU ini membuka kesempatan bagi satuan-satuan kerja pemerintah yang melaksanakan tugas operasional pelayanan publik (seperti layaknya kesehatan, pendidikan, pengelolaan kawasan, lisensi dan penyiaran) dengan lebih efektif, untuk membedakannya dari fungsi pemerintah sebagai regulator dan penentu kebijakan. Praktik ini telah berkembang luas di manca negara berupa upaya pengagenan (*agencification*) aktivitas yang tidak harus dilakukan oleh birokrat murni, tetapi berpotensi lebih efektif dan efisien bila diselenggarakan oleh Instansi yang dikelola bisnis (*business like*).

Di lingkungan pemerintah di Indonesia, terdapat banyak satuan kegiatan yang berpotensi untuk dikelola lebih efektif melalui pola Badan Layanan Umum. Diantara mereka ada yang memperoleh imbalan dari masyarakat dalam proporsi signifikan sehubungan dengan layanan yang diberikan, dan ada pula yang bergantung sebagian besar pada dana yang disediakan oleh APBN/APBD.

Kepada mereka, terutama yang selama ini mendapatkan hasil pendapatan dari layanannya dalam porsi signifikan, dapat diberikan keleluasaan dalam mengelola sumber daya untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan.

Salah satu yang menyebabkan rendahnya mutu pelayanan di instansi pemerintah tersebut adalah rendahnya fleksibilitas pengelolaan keuangan BLU. Berdasarkan pemikiran tersebut, pemerintah memberikan sejumlah fleksibilitas untuk instansi yang menerapkan PPK-BLU. Fleksibilitas tersebut yang menganut prinsip manajemen bisnis yang sehat. Fleksibilitas BLU meliputi pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, pengadaan barang/jasa, pengelolaan barang, pengelolaan piutang, utang, investasi, pemanfaatan surplus, dan remunerasi. Di samping itu, untuk mendukung manajemennya, BLU menerapkan sistem akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi komersial yang diterapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun, sebagai salah satu BLU di bawah binaan Kementerian Perhubungan, memiliki tanggung jawab besar untuk mengelola sumber daya secara efektif guna mencapai visi dan misinya. Kinerja keuangan BLU PPI Madiun menjadi salah satu aspek penting yang perlu dianalisis untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilan implementasi pengelolaan keuangan BLU.

Salah satu isu utama yang dihadapi oleh BLU, termasuk PPI Madiun, adalah tantangan dalam menjaga keseimbangan antara fleksibilitas keuangan dengan akuntabilitas. Sebagai entitas yang diberikan kewenangan lebih besar dibandingkan satuan kerja biasa, BLU diharapkan mampu menghasilkan pendapatan mandiri tanpa melupakan prinsip tata kelola yang baik. Namun, dalam praktiknya, terdapat kendala dalam pengelolaan keuangan yang mencakup kurangnya pemahaman atas regulasi terbaru, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, serta pengawasan yang belum optimal. Isu ini dapat berdampak pada ketidakefektifan pengelolaan anggaran, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Di sisi lain, dinamika ekonomi dan kebijakan fiskal pemerintah juga menjadi faktor eksternal yang memengaruhi kinerja keuangan BLU. PPI Madiun sebagai bagian dari sektor pendidikan dan pelatihan menghadapi tantangan untuk meningkatkan penerimaan melalui layanan yang inovatif, di tengah persaingan dengan lembaga pendidikan lain. Selain itu, keterbatasan pendanaan dari pemerintah memaksa BLU untuk mengoptimalkan potensi pendapatan lain, seperti melalui kerja sama dengan pihak swasta. Isu-isu tersebut membutuhkan pendekatan strategis dan perbaikan berkelanjutan agar PPI Madiun dapat terus berkembang sebagai BLU yang kompetitif dan akuntabel. Analisis kinerja ini tidak hanya membantu dalam menilai efisiensi pengelolaan anggaran, tetapi juga menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini, pendekatan berbasis indikator keuangan,

seperti tingkat likuiditas, solvabilitas, dan efektivitas penggunaan anggaran, dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi keuangan BLU PPI Madiun.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasi, menganalisa serta menginterpretasikan data sehingga diperoleh gambaran yang dibahas sesuai data yang dibutuhkan pada penelitian, yaitu data keuangan atau analisis terhadap neraca BLU Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun. Adapun Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu laporan keuangan BLU Politeknik Perkeretaapian Indonesia II(PPI) Madiun.

Metode dan Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kuantitatif yang dapat menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis mengenai data yang di analisis dan terhadap hasil perhitungan. Teknis analisis data dalam penelitian ini berdasarkan pada Peraturan Dirjen perbendaharaan nomor PER -36/PB/2016 dari segi keuangan. Terdapat delapan Indikator berdasarkan Peraturan Direktorat Jendral Perbendaharaan Nomor PER -36 / PB / 2016 dalam melakukan penilaian kinerja keuangan, penentuan masing masing rasio sebagai berikut:

a. Rasio Kas (*cash Ratio*)

Di gunakan untuk melihat perbandingan antara kas dan setara kas dengan kewajiban jangka pendek.

RK =

$$\frac{\text{Kas dan Setara Kas}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}} \times 100\%$$

Tabel 1. Daftar Skor Rasio RK

Rasio Kas (%) RK	Skor
RK > 480	0,25
420 < RK ≤ 480	0,5
360 < RK ≤ 420	1,0
300 < RK ≤ 360	1,5
240 < RK ≤ 300	2,0
180 < RK ≤ 240	1,5
120 < RK ≤ 180	1,0
60 < RK ≤ 120	0,5
0 < RK ≤ 60	0,25
RK=0	0

b. *Rasio Lancar (Current Rasio)*

Digunakan untuk melihat perbandingan antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek.

$$RL = \frac{\text{Aset Lancar}}{100\% \text{ Kewajiban Jangka Pendek}} \times$$

Tabel 2. Daftar Skor Rasio RL

Rasio Lancar (%) RL	Skor
RL > 600	3,0
480 < RL ≤ 600	2,5
360 < RL ≤ 480	2,0
240 < RL ≤ 360	1,5
120 < RL ≤ 240	1,0
0 < RL ≤ 120	0,5
RL=0	0

c. *Periode Penagihan Piutang (Collection Period)*

Collecting period Digunakan untuk melihat perbandingan antara piutang usaha dengan pendapatan usaha dalam satu tahun.

$$PPP = \frac{\text{Piutang Usaha} \times 360}{\% \text{ Pendapatan Usaha}} \times 1 \text{ Hari}$$

Tabel 3. Daftar Skor Rasio PPP

Periode Penagihan Piutang (hari) PPP	Skor
PPP < 30	2,0
30 ≤ PPP < 40	1,5
40 ≤ PPP < 60	1,0
60 ≤ PPP < 80	0,5
80 ≤ PPP < 100	0,25
PPP ≥ 100	0

d. *Perputaran Asset Tetap (Fixed Asset Turn Over)*

Di gunakan untuk melihat perbandingan antara pendapatan operasional dengan aset tetap.

$$PAT = \frac{\text{Pendapatan Operasional}}{100\% \text{ Aset Tetap}} \times$$

Tabel 4. Daftar Skor Rasio PAT

Perputaran Aset Tetap (%) PAT	Skor
PAT > 20	2,0
15 <PAT ≤ 20	1,5
10< PAT ≤ 15	1,0
5 < PAT ≤ 10	0,5
0 < PAT ≤ 5	0,25
PAT = 0	0

e. *Imbalan* atas Asset Tetap (*Return on Fixed Assets*)

Metode ini digunakan untuk melihat perbandingan antara *surplus/defisit* sebelum pos keuntungan/kerugian, tidak termasuk pendapatan investasi yang bersumber dari APBN, ditambah biaya penyusutan dengan nilai perolehan aset tetap tidak termasuk konstruksi dalam pengerjaan.

Surplus atau *Defisit*

$$\text{ROFA} = \frac{\text{Sebelum pos keuntungan atau kerugian}}{100\% \text{ Aset tetap}} \times$$

Tabel 5. Daftar Skor Rasio ROFA

Return on Fixed Assets (%) ROFA	Skor
ROFA > 6	2,0
5 < ROFA ≤ 6	1,7
4 < ROFA ≤ 5	1,4
3 < ROFA ≤ 4	1,1
2 < ROFA ≤ 3	0,8
1 < ROFA ≤ 2	0,5
0 < ROFA ≤ 1	0

f. *Imbalan* Ekuitas (*Return on Equity*)

Di gunakan untuk melihat perbandingan antara *surplus/defisit* sebelum pos keuntungan/kerugian, tidak termasuk pendapan investasi yang bersumber dari APBN, ditambah biaya penyusutan, dengan ekuitas setelah di kurangi *surplus/defisit* tahun berjalan.

Surplus atau *Defisit*

$$\text{ROE} : \frac{\text{Sebelum pos keuntungan atau kerugian}}{\text{Sebelum pos keuntungan atau kerugian}} \times 100\% \text{ Ekuitas-} \textit{Surplus} \text{ atau } \textit{defisit}$$

Tabel 6. Daftar Skor Rasio ROE

Return on Fixed Assets (%) ROE	Skor
ROE > 8	2,0
7 < ROE ≤ 8	1,8
6 < ROE ≤ 7	1,6
5 < ROE ≤ 6	1,4
4 < ROE ≤ 5	1,2
3 < ROE ≤ 4	1,0
2 < ROE ≤ 3	0,8
1 < ROE ≤ 2	0,6
0 < ROE ≤ 1	0,4
ROE=0	0

g. *Perputaran Persediaan (Inventory Turn Over)*

Di gunakan untuk melihat perbandingan antara jumlah total persediaan dengan pendapatan usaha.

$$PP = \frac{\text{Total Persediaan} \times 365}{1 \text{ hari Pendapatan BLUD}}$$

Tabel 7. Daftar Skor Rasio PP

Perputaran Persediaan (hari) PP	Skor
PP > 60	0
55 < PP ≤ 60	0,5
45 < PP ≤ 55	1,0
35 < PP ≤ 45	1,5
30 < PP ≤ 35	2,0
25 < PP ≤ 30	1,5
15 < PP ≤ 25	1,0
5 < PP ≤ 15	0,5
0 ≤ PP ≤ 5	0

h. Rasio PNBPN terhadap Biaya Operasional

Di gunakan untuk melihat perbandingan antara jumlah total persediaan dengan pendapatan usaha.

$$PB = \frac{\text{Pendapatan PNBPN}}{\text{Biaya Operasional}} \times 100\%$$

Tabel 8. Daftar Skor Rasio PB

Rasio PNBPN terhadap Biaya Operasional (%) PB	Skor
$PB > 65$	4,0
$57 < PB \leq 65$	3,5
$50 < PB \leq 57$	3,0
$42 < PB \leq 50$	2,5
$35 < PB \leq 42$	2,0
$28 < PB \leq 35$	1,5
$0 < PB \leq 28$	1,0

Sumber: Peraturan Dirjen Perbendaharaan

Dari peraturan Direktur Jedral Perbendaharaan Nomor PER -36 / PB / 2016 dilakukan suatu modifikasi terhadap pengelompokan kriteria. Modifikasi dilakukan karena penelitian ini hanya akan menilai terhadap aspek kinerja keuangan dengan menggunakan rasio keuangan tanpa menilai kinerja dari aspek kepatuhan pengelolaan keuangan BLUD dari aspek pelayanan. Hasil penilaian kinerja keuangan BLUD ditentukan berdasarkan Total Skor (TS) yang di peroleh BLUD yang dibagi ke dalam 3 kategori, yaitu BAIK, SEDANG dan BURUK.

- a. Kriteria BAIK jika skor yang di diperoleh BLUD terdiri atas:
 - 1) AAA, apabila $TS > 18,05$.
 - 2) AA, apabila $15,2 < TS \leq 18,5$.
 - 3) A, apabila $12,92 < TS \leq 15,2$.
- b. Kriteria SEDANG jika skor yang di diperoleh BLUD terdiri atas:
 - 1) BBB, apabila $10,64 < TS \leq 12,92$.
 - 2) BB, apabila $8,55 < TS \leq 10,64$.
 - 3) B, apabila $6,65 < TS \leq 8,55$.
- c. Kriteria BURUK jika skor yang di diperoleh BLUD terdiri atas:
 - 1) CC, apabila $2,85 \leq TS \leq 6,65$.
 - 2) C, apabila TS pada hasil penilaian aspek keuangan yang dicapai BLUD kurang dari 50%.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Laporan Keuangan

Penelitian ini mengukur kinerja keuangan BLU Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun menggunakan 8 metode yaitu:

- a. Kinerja Keuangan BLU diukur dari Rasio Kas (*Cash Ratio*). Pengukuran

ini digunakan untuk membandingkan antara kas dan setara kas dengan kewajiban jangka pendek.

Tabel 9: Hasil Perhitungan Rasio Kas Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri (PPI) Madiun

Tahun	Rumus Perhitungan	Kas dan Setara Kas(Rp)	Kewajiban Jangka pendek	Rasio Kas (RK)	Skor
2016	$\frac{57.586.040}{33.809.876} \times 100\%$	57.586.040	33.809.876	170 %	1
2017	$\frac{154.740.483}{89.249.647} \times 100\%$	154.740.483	89.249.647	173%	1
2018	$\frac{2.939.329}{50.500.558} \times 100\%$	2.939.329	50.500.558	5,82 %	0,25
2019	$\frac{81.357.423}{97.029.371} \times 100\%$	81.357.423	97.029.371	83,84 %	0,5
2020	$\frac{2.924.970}{62.344.394} \times 100\%$	2.924.970	62.344.394	4,69 %	0,25

Sumber: data diolah

Berdasarkan Tabel diatas Rasio Kas Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun menunjukkan adanya fluktuasi nilai rasio kas dan cenderung menurun. Kemampuan kas untuk menutupi kewajiban jangka pendek dari tahun 2016 hingga tahun 2020 secara urut memiliki skor 1, 1, 0,25, 0,5 dan 0,25. Berdasarkan aturan Dirjen perbendaharaan Nomor PER-36/PB/2016 hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa skor rasio kas tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 nilai skor < 3.

- b. Kinerja Keuangan BLUD diukur dari Rasio Lancar (*Current Ratio*). Pengukuran ini digunakan untuk membandingkan antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek.

Tabel 10. Hasil Perhitungan Rasio Lancar Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Industri (PPI) Madiun						
Tahun	Rumus	Perhitungan	Aset Lancar (Rp)	Kewajiban Jangka pendek(Rp)	Rasio Lancar (R)	Skor
2016		$\frac{90.201.813}{33.809.876} \times 100\%$	90.201.813	33.809.876	266,79 %	1,5
2017		$\frac{421.158.852}{89.249.647} \times 100\%$	421.158.852	89.249.647	471,88%	2.0
2018		$\frac{186.501.685}{50.500.558} \times 100\%$	186.501.685	50.500.558	369,30%	2,0
2019		$\frac{368.932.173}{97.029.371} \times 100\%$	368.932.173	97.029.371	380,22%	2,0
2020		$\frac{269.390.721}{62.344.394} \times 100\%$	269.390.721	62.344.394	432,10%	2,0

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel diatas Rasio lancar Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun mengalami fluktuasi hal tersebut dapat dilihat dari nilai rasio lancar pada tahun 2016 sebesar 266,79%. Rasio tersebut meningkat hampir 2 kali lipat di tahun 2017 yaitu sebesar 471.88%. Selanjutnya mengalami penurunan selama 2 tahun yaitu di tahun 2018 dan 2019 sebesar 369,30% dan 380,22% dan meningkat menjadi 432,100% tahun 2020. Berdasarkan Dirjen perbendaharaan Nomor PER-36/PB/2016 Hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa skor rasio lancar tahun 2016 - 2020 menunjukan skor < 3. Hal ini disebabkan karena kemampuan aset lancar PPI Madiun terhadap kewajiban jangka pendek mengalami kenaikan.

- c. Periode Penagihan Piutang (*Collecting Period*), yaitu dengan membandingkan antara piutang usaha dengan pendapatan usaha dalam satu tahun. Kinerja keuangan diukur menggunakan metode collecting periode dengan rumus:

$$PPP = \frac{\text{Piutang Usaha}}{1 \text{ Hari} \% \text{ Pendapatan Usaha}} \times 360$$

Tabel 11. Hasil Perhitungan Rasio Periode Penagihan Piutang

Tahun	Rumus	Perhitungan	Piutang Usaha (Rp)	Pendapatan Usaha (Rp)	Periode Penagihan Piutang (PPP)	Skor
2016		$\frac{13.976.000}{2.389.197.117} \times 1 \text{ hari}$	13.976.000	2.389.197.117	2 Hari	2,0
2017		$\frac{82.138.000}{2.863.919.099} \times 1 \text{ hari}$	82.138.000	2.863.919.099	10 Hari	2,0
2018		$\frac{74.805.500}{2.955.987.430} \times 1 \text{ hari}$	74.805.500	2.955.987.430	9 Hari	2,0
2019		$\frac{18.154.000}{3.374.018.504} \times 1 \text{ hari}$	18.154.000	3.374.018.504	1 Hari	2,0
2020		$\frac{0}{2.550.181.859} \times 1 \text{ hari}$	0	2.550.181.859	0 Hari	0

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel diatas Periode Penagihan Piutang (PPP) Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun mengalami fluktuasi yang mana pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa tahun 2016 yaitu 2 hari, tahun 2017 mengalami kenaikan yaitu 10 hari, Pada tahun 2018 yaitu 9 hari, sedangkan pada tahun 2019 1 hari dan tahun 2020 saldo piutangnya 0 sehingga 0 hari. Berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-36/PB/2016 periode penagihan piutang pada tahun 2016 hingga 2020 yang terhitung dalam range 0 sampai dengan 10 hari, masuk ke dalam kategori maksimum yaitu yang paling optimal dengan skor skala 2.

- d. Kinerja Keuangan BLUD dengan menggunakan Perputaran Aset Tetap (*Fixed Asset Turn Over*). Pengukuran ini digunakan untuk membandingkan antara pendapatan oprasional lembaga dengan aset tetap.

Tabel 12. Hasil Perhitungan Rasio Perputaran Aset Tetap

Tahun	Rumus Perhitungan	Pendapatan Operasional (Rp)	Aset Tetap (Rp)	Perputaran Aset Tetap (PAT)	Skor
2016	$\frac{2.389.197.117}{3.360.948.121} \times 100\%$	2.389.197.117	3.360.948.121	71,86%	2,0
2017	$\frac{2.863.919.099}{2.912.676.583} \times 100\%$	2.863.919.099	2.912.676.583	98,32%	2,0
2018	$\frac{2.955.987.430}{6.703.615.860} \times 100\%$	2.955.987.430	6.703.615.860	44,09 %	2,0
2019	$\frac{3.374.018.504}{6.005.489.227} \times 100\%$	3.374.018.504	6.005.489.227	56,18 %	2,0
2020	$\frac{2.550.181.859}{4.975.956.776} \times 100\%$	2.550.181.859	4.975.956.776	51,25%	2,0

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel diatas Perputaran Aset Tetap (PAT) Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun mengalami fluktuasi, dimana tahun 2017 memiliki tingkat perputaran aset paling lancar yaitu sebesar 98.32%, naik 26 persen dari tahun 2016. Pada tahun 2018 rasio PAT turun sebesar 54 persen menjadi 44.09% dan mengalami sedikit kenaikan di tahun 2019 di angka 56,18%. Selanjutnya, pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 51,25%. Dengan demikian perputaran aset tetap Kinerja Keuangan BLUD diukur dari Imbalan Arus Aset Tetap (*Return on Fixed Asset*), dengan membandingkan antara *Surplus/ Defisit* sebelum pos keuntungan/ kerugian, tidak termasuk pendapatan investasi yang bersumber dari APBN, ditambah biaya penyusutan dengan nilai perolehan aset tetap tidak termasuk konstruksi dalam pengerjaan. Kinerja keuangan diukur menggunakan metode *Return on Fixed Asset (ROFA)* dihitung dengan rumus:

$$ROFA = \frac{\text{Surplus atau Defisit sebelum pos keuntungan atau kerugian}}{\text{Aset Tetap}} \times 100\%$$

Tabel 13. Hasil Perhitungan Imbalan Rasio Arus Aset Tetap

Tahun	Rumus Perhitungan	Surplus / Deficit Aset Tetap (Rp)	ROFA	Skor
2016	$\frac{-308.422.920}{3.360.948.121} \times 100\%$	-308.422.920 3.360.948.121	-9,18 %	0
2017	$\frac{-1.111.886.850}{2.912.676.583} \times 100\%$	-1.111.886.850 2.912.676.583	-38,17 %	0
2018	$\frac{-1.284.064.639}{6.703.615.860} \times 100\%$	-1.284.064.639 6.703.615.860	-19,15 %	0
2019	$\frac{-2.160.418.804}{6.005.489.227} \times 100\%$	-2.160.418.804 6.005.489.227	-35,97 %	0
2020	$\frac{-1.637.869.785}{4.975.956.776} \times 100\%$	-1.637.869.785 4.975.956.776	-32,92 %	0

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel diatas, ROFA Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun mengalami fluktuasi yaitu pada tahun 2016 imbalan atas aset tetap sebesar -9,18%, dan pada tahun 2017 menjadi -38,17%, tahun 2018 sebesar -19,15% dan tahun 2019 dan 2020 yaitu sebesar -35,97% dan -32,92%. Hal ini disebabkan Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun selalu mengalami defisit dalam laporan operasional.

- e. Kinerja Keuangan BLU diukur melalui Imbalan atas Ekuitas (*Return on Equity*). Pengukuran ini digunakan untuk membandingkan antara *Surplus/Defisit* sebelum pos keuntungan/kerugian, tidak termasuk pendapatan investasi yang bersumber dari APBN, ditambah biaya penyusutan dengan ekuitas setelah dikurangi surplus/defisit sebelum pos tahun berjalan. Kinerja keuangan diukur menggunakan metode *Return on Equity (ROE)* dihitung dengan rumus:

$$ROE = \frac{\text{Surplus atau Defisit sebelum pos keuntungan atau kerugian}}{\text{Ekuitas - Surplus atau defisit sebelum pos keuntungan atau kerugian}} \times 100$$

Tabel 14. Hasil Perhitungan Rasio *Return on Equity*

Tahun	Surplus / Defisit (Rp)	Ekuitas (Rp)	Imbalan Ekuitas (ROE)	Skor
2016	-308.422.920	3.417.340.058	-8,2%	0
2017	-1.111.886.850	3.244.585.788	-25,52%	0
2018	-1.284.064.639	6.899.847.453	-15,69%	0
2019	-2.160.418.804,89	6.312.647.135	-34,22%	0
2020	-1.637.869.785,66	5.214.089.696,26	-31,41%	0

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel diatas ROE Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun mengalami fluktuasi di mana pada tahun 2016 imbalan ekuitas sebanyak - 8,2%, menjadi -25,52% di tahun 2017, tahun 2018 mengalami sedikit peningkatan menjadi -15,69%, tahun 2019 dan 2020 turun menjadi -34,22% dan -31,41%. Berdasarkan standar Dirjen perbendaharaan Nomor Per - 36/PB/2016 nilai ROE Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun memiliki skor 0 dari nilai skor maksimum 2, karena selalu mengalami defisit sehingga imbalan ekuitas selalu minus.

- f. Kinerja Keuangan BLU diukur dengan Perputaran Persediaan (*Inventory Turn Over*). Pengukuran dengan membandingkan antara jumlah total persediaan dengan pendapatan usaha. Kinerja keuangan diukur menggunakan metode *Inventory Turn Over* (ITO) dengan rumus:

$$ITO = \frac{\text{Total Persediaan} \times 365}{\text{Pendapatan BLUD}} \times 1 \text{ hari}$$

Tabel 15. Hasil Perhitungan Rasio Perputaran Persediaan

Tahun	Rumus	Perhitungan	Total Persediaan (Rp)	Pendapatan BLUD (Rp)	Perputaran Persediaan (PP)	Skor
2016	18.639.773	$\times \frac{365}{2.389.197.117}$ 2 Hari	18.639.773	2.389.197.117		0
2017	184.280.369	$\times \frac{365}{2.863.919.099}$ 23 Hari	184.280.369	2.863.919.099		1,0
2018	108.756.856	$\times \frac{365}{2.955.987.430}$ 13 hari	108.756.856	2.955.987.430		0.5
2019	269.420.750	$\times \frac{365}{3.374.018.504}$ 29 Hari	269.420.750	3.374.018.504		1,5
2020	266.465.752	$\times \frac{365}{2.550.181.859}$ 38 Hari	266.465.752,69	2.550.181.859		1,5

Sumber: data diolah

Berdasarkan perhitungan pada tabel di atas menunjukkan fluktuatif pada tingkat perputaran persediaan. Pada 2016 adalah 2 hari, menjadi 23 hari pada tahun 2017, menjadi 13 hari di tahun 2018, 29 hari di tahun 2019 dan 38 hari di tahun 2020. Berdasarkan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER- 36/PB /2016 perputaran persediaan pada tahun 2016 belum efisien. Tahun 2017 pengelolaan persediaan mengalami kenaikan namun masih kurang efisien, pada tahun 2018 perputaran persediaan mengalami penurunan dan masih belum efisien, pada tahun 2019 dan tahun 2020 pengelolaan persediaan sudah mendekati efisien.

- g. Kinerja Keuangan BLU diukur dengan rasio PNBPN (Pendapatan Negara Bukan Pajak) terhadap biaya operasional. Pengukuran ini digunakan untuk membandingkan antara penerimaan PNBPN dengan biaya operasional.

Tabel 16. Hasil Perhitungan Rasio PNB

Tahun	Rumus Perhitungan	Pendapatan PNB (Rp)	Biaya Operasional (Rp)	PB (%)	Skor
2016	$\frac{2.389.197.117}{2.697.670.037} \times 100\%$	2.389.197.117	2.697.670.037	88,56 %	4,0
2017	$\frac{2.863.919.099}{3.975.805.949} \times 100\%$	2.863.919.099	3.975.805.949	72 %	4,0
2018	$\frac{2.955.987.430}{4.240.052.069} \times 100\%$	2.955.987.430	4.240.052.069	69,71 %	4,0
2019	$\frac{3.374.018.504}{5.534.437.308} \times 100\%$	3.374.018.504	5.534.437.308	60,96 %	3,5
2020	$\frac{2.550.181.859}{2.389.197.117} \times 100\%$	2.550.181.859	4.184.262.974,66	60,95 %	3,5

Sumber: data diolah

Tabel di atas menunjukkan nilai rasio PNB terhadap Biaya Operasional Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun cenderung mengalami penurunan, pada tahun 2016 sebesar 88,56, tahun 2017 sebesar 72,00% dan tahun 2018 sebesar 69,71%, tahun 2019 senilai 60,69% dan 60,95% di tahun 2020. Berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-36/PB/2016 tahun 2016, 2017 dan 2018 skor PB nilai 4 dari nilai skor maksimum 4 hal tersebut menunjukan bahwa Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun mempunyai kemampuan meningkatkan pendapatannya. Pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan yaitu skor PB dengan nilai 3,5 menunjukan kemampuan meningkatkan pendapatan melalui penggunaan biaya kurang efektif.

Kinerja Keuangan BLU Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun

Berdasarkan hasil analisis masing masing rasio, disajikan ringkasan kinerja keuangan BLU Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun dalam tabel berikut:

Tabel 17. Kinerja Keuangan BLU Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri (PPI) Madiun

No	Tahun	Indikator	Rasio Kinerja Keuangan	Skor	Total Skor (TS)
1	2016	RK	170%	1,0	
		RL	267%	1,5	
		PPP	2 Hari	2,0	
		PAT	72%	2,0	
		ROFA	-9%	0,0	
		ROE	-8,20%	0,0	
		PP	2 Hari	0,0	
		PB	89%	4,0	
		Total skor (TS)			10,5
2	2017	RK	173%	1,0	
		RL	471,88%	2,0	
		PPP	10 Hari	2,0	
		PAT	98,32%	2,0	
		ROFA	-38,17%	0,0	
		ROE	-25,52%	0,0	
		PP	23 Hari	1,0	
		PB	72%	4,0	
		Total skor (TS)			12
3	2018	RK	6%	0,25	
		RL	369%	2,0	
		PPP	9 Hari	2,0	
		PAT	44%	2,0	
		ROFA	-19%	0,0	
		ROE	-15,69%	0,0	
		PP	13 Hari	0,5	
		PB	70%	4,0	
		Total skor (TS)			10,75
4	2019	RK	83,84%	0,5	
		RL	380,23%	2,0	
		PPP	2 Hari	2,0	
		PAT	56,18%	2,0	
		ROFA	-35,97%	0,0	
		ROE	-34,225	0,0	
		PP	29 Hari	1,5	
		PB	60,96%	3,5	

Total skor (TS)					11,5
5	2020	RK	4,69%	0,25	
		RL	432,10%	2,0	
		PPP	0 Hari	2,0	
		PAT	44%	2,0	
		ROFA	-32,92%	0,0	
		ROE	-31,41%	0,0	
		PP	38 Hari	1,5	
		PB	60,95%	3,5	
Total skor (TS)					11,25

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel diatas skor rasio Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun mengalami fluktuasi terlihat dari total skor yang ada pada setiap tahunnya. Pada tahun 2016 skor rasio keuangan sebesar 10,5, pada tahun 2017 menjadi 12, tahun 2018 total skor menjadi 10,75. Pada tahun 2019 menjadi 11,5 dan tahun 2020 senilai 11,25. Berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-36 /PB /2016 ayat (1) Hasil penilaian Kinerja BLU Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun termasuk dalam Kriteria sebagai berikut:

Tabel 18. Penilaian Rasio Kinerja BLU Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun

Tahun	Total Skor (TS)	Kriteria	Predikat
2016	10,5	SEDANG	BB
2017	12	SEDANG	BBB
2018	10,75	SEDANG	BBB
2019	11,5	SEDANG	BBB
2020	11,25	SEDANG	BBB

Sumber: Data diolah, 2022

Analisis dan Pembahasan

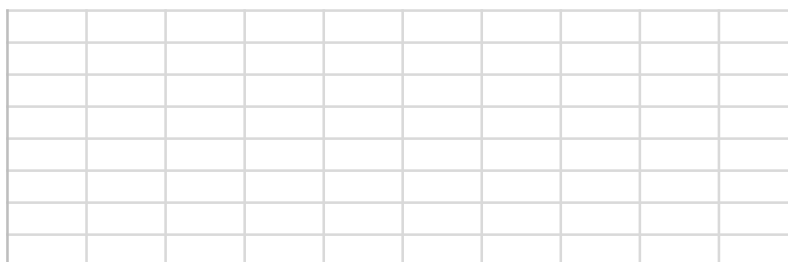
Berdasarkan analisis data diatas menunjukan bahwa kinerja keuangan Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun belum memenuhi kriteria penilaian yang baik. Berikut analisis perkembangan kinerja keuangan Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun sebagai berikut:

1. Ditinjau dari Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Kinerja keuangan ditinjau dari rasio kas mengalami fluktuasi yang dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Gambar 1. Grafik Perkembangan Rasio Kas Tahun 2016 - 2020

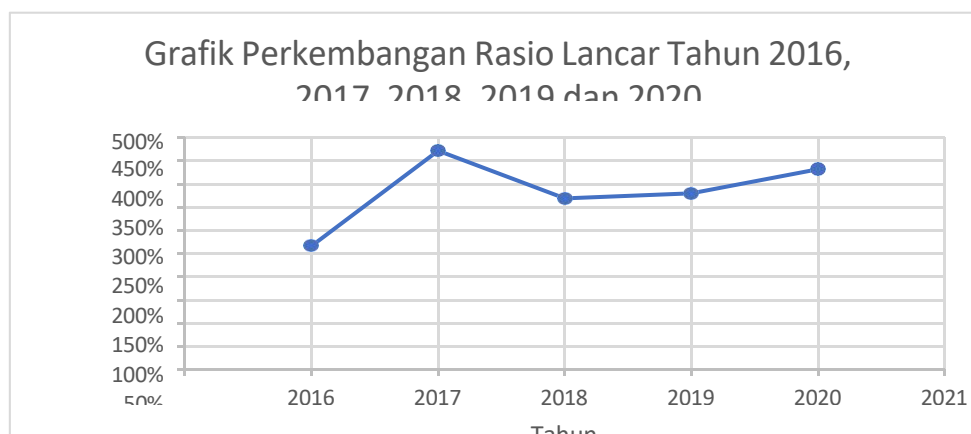




Dengan adanya grafik yang naik turun tersebut, Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun sebaiknya dapat meningkatkan kemampuan dalam meningkatkan kas untuk menutupi kewajiban jangka pendek atau dapat menyeimbangkan antara kewajiban jangka pendek dengan posisi kas Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun .

2. Ditinjau dari Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Kinerja keuangan ditinjau dari rasio lancar mengalami fluktuasi sepanjang tahun penelitian 2016 sampai 2020.

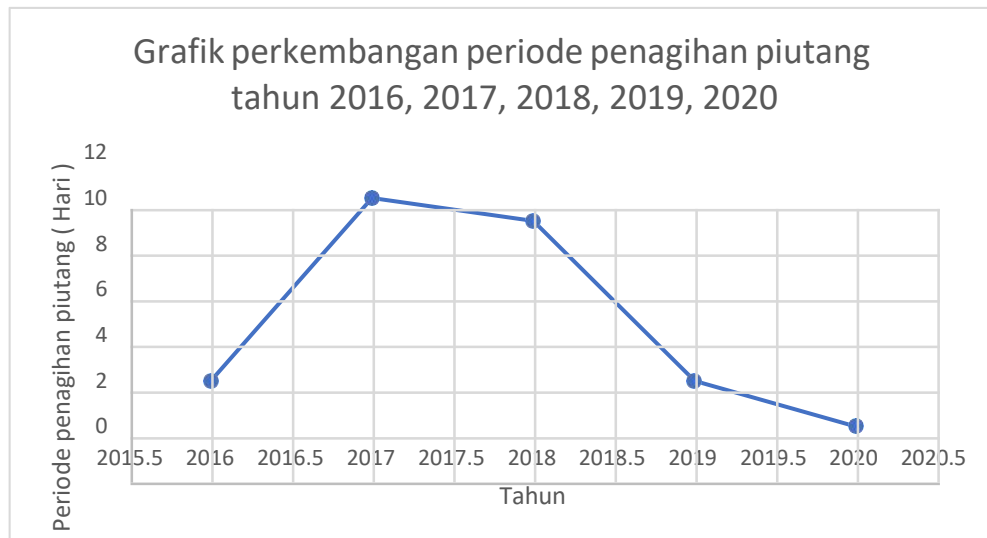


Gambar 2. Grafik Perkembangan Rasio Lancar Tahun 2016 - 2020.

Grafik di atas memperlihatkan jelas bagaimana fluktuasi pada nilai rasio lancar Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun. Terlihat adanya kenaikan rasio pada tahun 2017 dan turun pada tahun 2018. Pada tahun 2019 dan 2020 nilai rasio lancar sedikit demi sedikit mengalami kenaikan meskipun belum cukup signifikan. Dengan rasio lancar yang fluktuatif sebaiknya Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun meningkatkan lagi pengelolaan aset lancar untuk memenuhi kebutuhan akan kas Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun.

3. Ditinjau dari Periode Penagihan Piutang (*Collecting Period*)

Kinerja Keuangan ditinjau dari periode penagihan piutang Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun yang diukur menggunakan metode periode penagihan piutang ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 3. Grafik Periode Penagihan Piutang Tahun 2016 - 2020

Naik turunnya nilai periode penagihan piutang pada Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun masih termasuk dalam skor nilai maksimum yaitu skor 2. Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun sebaiknya mempertahankan nilai periode penagihan piutang yang sudah baik dan mencapai nilai skor maksimum.

4. Ditinjau dari Perputaran Aset Tetap (*Fixed Asset Turn Over*)

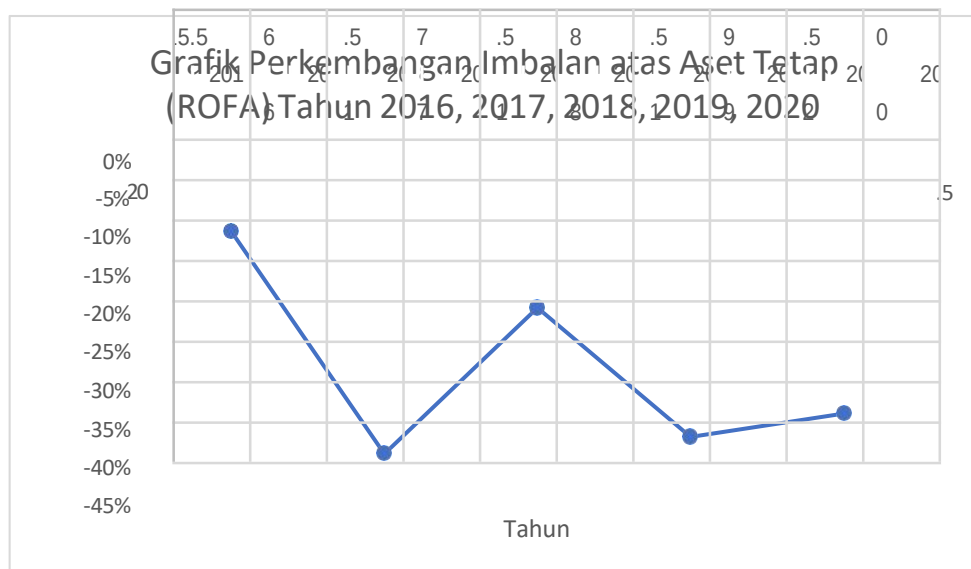
Kinerja Keuangan Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun di tinjau dari perputaran aset tetap tahun 2016 - 2020 mengalami fluktuasi. Namun dari tahun 2016 sampai tahun 2020 skor kinerja PAT masih tetap mendapatkan skor nilai maksimum yaitu skor 2. Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun sebaiknya mempertahankan dan lebih meningkatkan kemampuan dalam mengelola aset.



Gambar 4. Grafik Perputaran Penagihan Piutang Tahun 2016 - 2020

5. Ditinjau dari Imbalan atas Aset Tetap (*Return On Fixed Asset*)

Kinerja Keuangan ditinjau dari Imbalan Aset tetap mengalami fluktuatif namun dikarenakan nilai pos keuntungan dan kerugian sepanjang tahun berjalan adalah minus, maka skor atas rasio bernilai nol, Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun ditinjau dari Imbalan atas Aset Tetap belum mampu mengelola aset tetap secara efektif.



Gambar 5. Grafik Perkembangan Imbalan Atas Aset Tetap (ROFA) Berdasarkan gambar grafik perkembangan Imbalan atas Aset Tetap Tahun 2016 - 2020

Grafik menunjukkan rasio turun dan naik tetapi berada pada posisi minus. Maka Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun sebaiknya meningkatkan pengelolaan kinerja operasional untuk menghasilkan *surplus*.

6. Ditinjau dari Imbalan Ekuitas (*Return On Equity*)

Kinerja keuangan ditinjau dari rasio Imbalan Ekuitas memiliki perubahan rasio yang fluktuatif. Nilai *surplus/defisit* sebelum pos keuntungan dan kerugian selama periode penelitian adalah minus dan menjadikan skor kinerja keuangan berdasarkan ROE 0. Dengan demikian ditinjau dari rasio imbalan aset tetap Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun belum mampu mengelola ekuitas untuk menghasilkan *surplus*.

5.5	6	.5	7	.5	8	.5	9	.5	0
201	2016	201	201	201	2016	201	2019	202	2020

Gambar 6. Grafik perkembangan Imbalan Ekuitas (ROE) Tahun 2016 - 2020

7. Ditinjau dari Perputaran Persediaan (*Inventory Turn Over*)

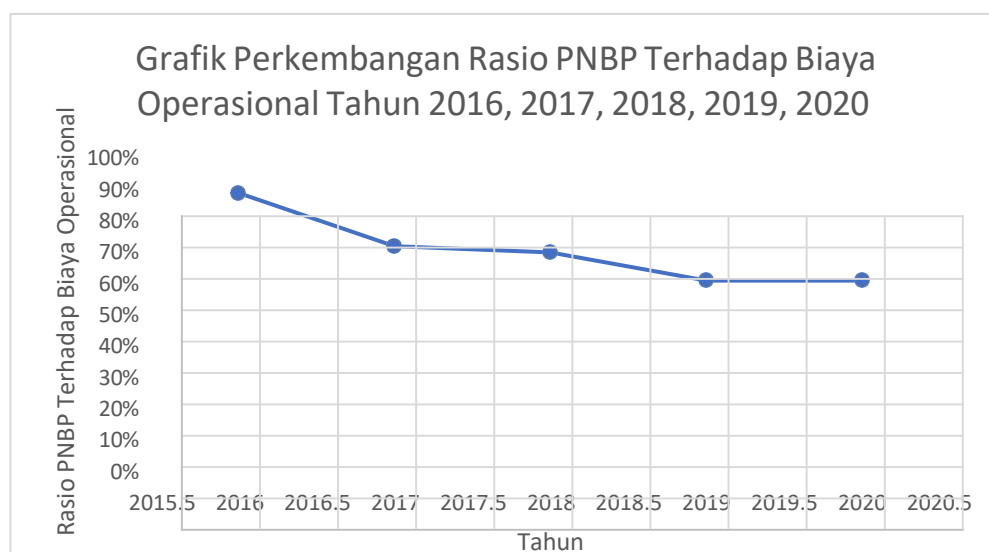
Kinerja keuangan ditinjau dari Perputaran Persediaan tahun 2016 - 2020 menunjukkan adanya kecenderungan kenaikan rasio. Hal tersebut memperlihatkan bahwa Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun sudah mampu mengelola persediaannya meskipun belum maksimal, sehingga kemampuan Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun dalam mengelola perputaran persediaan masih perlu ditingkatkan.



Gambar 7. Grafik Perkembangan Perputaran Persediaan (PP)

8. Ditinjau Dari Rasio PNBPN (Pendapatan Negara Bukan Pajak) Terhadap Biaya Operasional

Kinerja keuangan rasio PNBPN terhadap biaya operasional tahun 2016, 2017 dan 2018 berada pada skor 4 dari nilai maksimum 4. tahun 2019 dan 2020 menjadikan penurunan skor pada nilai 3,5. Hal tersebut menunjukan bahwa Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun perlu meningkatkan kemampuan dalam memperoleh pendapatan secara efektif dan efisien.



Gambar 8. Grafik Perkembangan Rasio PNBPN Terhadap Biaya Operasional

9. Perkembangan Kinerja keuangan BLU Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun

Kinerja keuangan tahun 2016 - 2020 dapat di lihat dari bobot total skor yang di dapatkan. Perkembangan tersebut dapat dilihat pada gambar grafik dibawah ini:



Berdasarkan gambar grafik perkembangan kinerja keuangan Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun Tahun 2016 - 2020 bisa dilihat bahwa garis yang bergerak selalu mengalami fluktuasi sehingga diharapkan agar Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun meningkatkan dan menstabilkan kinerja keuangan. Rasio kinerja keuangan Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun berdasarkan total skor tahun 2016 - 2020 termasuk dalam kategori sedang.

KESIMPULAN

Melalui analisis data yang telah dilakukan dan berdasarkan peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-36/ PB / 2016 yang telah di modifikasi terhadap pengelompokan kriteria penilaian kinerja dengan menggunakan rasio kas, rasio lancar, periode penagihan piutang, perputaran aset tetap, imbalan atas aset tetap, imbalan ekuitas, perputaran persediaan, rasio PNPB terhadap biaya operasional dan kemudian dikelompokkan serta dihitung menggunakan total skor, maka hasil penilaian kinerja BLU Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun adalah sebagai berikut :

- a. Tahun 2016 hasil perhitungan Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun total skor adalah sebesar 10,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kinerja keuangan Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun tergolong dalam kriteria SEDANG dengan Predikat BB.
- b. Tahun 2017 dengan total skor sebesar 12, sehingga dapat

- disimpulkan bahwa kinerja keuangan Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun tergolong dalam kriteria SEDANG dengan Predikat BBB.
- c. Tahun 2018 dengan total skor sebesar 10,75 maka Kinerja keuangan Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun tergolong dalam kriteria SEDANG dengan Predikat BBB.
 - d. Tahun 2019 dengan total skor sebesar 11,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun tergolong dalam kriteria SEDANG dengan Predikat BBB.
 - e. Tahun 2020 dengan total skor sebesar 11,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun tergolong dalam kriteria SEDANG dengan Predikat BBB.

DAFTAR PUSTAKA

- Hutabarat, T. (2020). *Penilaian Kinerja Keuangan Perusahaan*. Jakarta: Penerbit Andi.
- Ofasari, R. (2018). *Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Dengan Menggunakan Metode Value For Money*. [Tesis]. Universitas Sriwijaya.
- Pang, A., Chee, C., & Wong, Y. (2020). *Corporate Financial Performance Metrics and its Implications*. Asian Journal of Finance.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Wahyuningsih, T., & Widowati, S. (2016). *Manajemen Strategis Perusahaan*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Wijaya, E., Taufik, M., & Handayani, A. (2023). *Evaluasi Realisasi Anggaran Belanja pada Rumah Sakit X Bekasi*. Journal of Hospital Management Studies, 15(2), 45–58.
- Yaman, R. (2022). *Analisis Kinerja Keuangan pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta: Pendekatan Value for Money dan Rasio Keuangan*. [Tesis]. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Yulianingtyas, D. (2016). *Pengelolaan Kinerja Non-Keuangan Perusahaan*. Surabaya: Airlangga University Press.